



**SENIN, 07 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## TPP Seluma Segera Naik ke Penyidikan

**RBI, BENGKULU** - Kasus Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Seluma tahun 2017 mencapai Rp 50 Miliar yang terindikasi merugikan negara Rp 12 Miliar yang dilidik Kejati Bengkulu itu berpotensi besar naik ke penyidikan. Sebab, hasil pertemuan tim Penyidik Kejati dengan Biro Hukum Kemendagri minggu lalu, ada saksi ahli yang mengatakan pengucuran TPP tersebut menyalahi aturan di Kemendagri. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaolo SH, MH melalui Aspidsus Hendri Nainggolah SH, MH untuk penanganan kasus TPP tersebut hasil dari pertemuan tim yang diutuskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada. Sekarang tinggal menunggu instruksi Kajati.

"Kita sudah menemui Biro Hukum Kemendagri. Sekarang kita masih menunggu pak Kajati yang sekarang sedang bertugas di Palembang. Mungkin setelah beliau pulang kita sudah menentukan sikap atau menentukan penetapan apakah ini perkara lanjut atau tidak. Naik ke penyidikan atau tidak,"ucap Handri Nainggolan kemarin.

Hasil konsultasi tim dengan Biro Hukum Kemendagri, kata Hendri, sudah ada keterangan dari salah ahli yang membidangi terkait dengan Peraturan Kemendagri, atau orang yang mengerti masalah Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pengucuran TPP tersebut. "Ya, hasilnya

mereka mengatakan bahwa pengucuran TPP itu tidak memenuhi apa yang diinstruksikan dari Kemendagri. Dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengeluarkan TPP itu menyalahi aturan di Kemendagri, dan ada Peraturan Pemerintah,"pungkas Hendri.

Masih dikatakan Hendri, sejauh ini pihaknya belum bisa mengatakan atau menjabarkan lebih banyak terkait dengan kepastian tindak lanjut kasus TPP yang diduga merugikan negara Rp 12 Miliar tersebut. Sebab, pihaknya masih mengkaji hasil pertemuan dari Kemendagri.

"Untuk sementara perkembangannya itu dulu ya. Nanti setelah ini akan kita tingkatkan ke penyidikan,"demikian ucapnya.

Untuk diketahui, kasus tersebut mulai mencuat sejak adanya protes dan kesenjangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Seluma terkait dengan besaran TPP tersebut. Sehingga besaran TPP itu dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk memastikan apakah ada indikasi kesalahan atau tidak. Sementara Kejati yang sudah melidik perkara tersebut sejauh ini sudah pernah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Seluma. Diantaranya, Asisten I Pemkab Seluma, Mirin Ajib, Kabid pada BPKAD Pemkab Seluma, dan juga beredar kabar bahwa Sekda pada Pemkab Seluma juga sudah pernah dimintai keterangan terkait dengan TPP tersebut. (ide)